



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

(RENJA) PERUBAHAN 2025

**20
25**



Jl. Jend. Sudirman No. 1 Sampit



(0531) - 32796 Fax. (0531) 33074



bkpsdm@kotimkab.go.id



www.bkpsdm.kotim.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

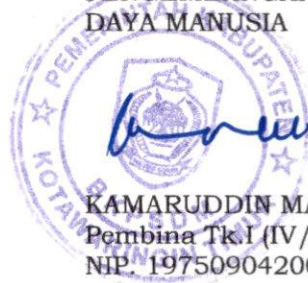
Dokumen ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan aktual organisasi dalam menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks dan dinamis. Rencana kerja ini tidak hanya menjadi instrumen perencanaan tahunan, tetapi juga sebagai refleksi komitmen BKPSDM untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian serta pengembangan kompetensi aparatur sipil negara secara terukur, adaptif, dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan hasil dari proses yang partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan internal secara aktif dalam merumuskan langkah strategis, sasaran, dan prioritas kinerja yang lebih tepat sasaran. Dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan efektivitas, dokumen ini diharapkan menjadi landasan kuat dalam pengelolaan program dan anggaran, serta sebagai panduan operasional bagi seluruh jajaran BKPSDM dalam melaksanakan tugas secara profesional dan inovatif.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman yang aplikatif dan inspiratif dalam mewujudkan pelayanan kepegawaian yang unggul dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

Sampit, Juli 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA



KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197509042000031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
3.3. Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB V PENUTUP.....	62
5.1. Catatan penting	62
5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan	63
5.3. Rencana tindak lanjut	63
5.4. Kesesuaian dengan Rancangan Awal RKPD	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra BKPSDM s/d Tahun 2025 Kabupaten Kotawaringin Timur
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tabel T-C.30
Tabel 2.4	Review terhadap RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kotawaringin Timur Tabel T.C.31
Tabel 2.5	Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 Tabel T-C.32
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kotawaringin Timur Tabel T-C.33
Tabel 4.1	Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur disusun sebagai respons atas dinamika perubahan yang terjadi baik dalam kebijakan nasional, provinsi, maupun kondisi aktual di daerah. Penyusunan Renja Perubahan dilakukan dengan tetap berpedoman pada perencanaan pembangunan daerah, serta mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya.

Renja Perubahan merupakan proses pemikiran strategis yang dikembangkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan isu-isu aktual, pergeseran prioritas pembangunan, serta kondisi eksisting Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kualitas penyusunan Renja Perubahan sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Renja Perubahan ini juga menjadi bagian dari mekanisme penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penganggaran di perubahan APBD, serta sebagai bahan pengusulan program/kegiatan yang berpotensi mendapatkan dukungan pendanaan dari APBD Provinsi maupun APBN.

Dengan demikian, penyusunan Renja Perubahan menjadi instrumen penting untuk memastikan program dan kegiatan yang dijalankan tetap adaptif, relevan, serta berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara optimal.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan monenklatur perencanaan dan keuangan daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;
16. Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan yang telah disesuaikan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mencapai target kinerja yang diinginkan selama tahun anggaran berjalan. Dokumen ini juga bertujuan untuk menganalisis capaian kinerja terkini serta menyesuaikan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan aparatur. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini tetap mengacu pada Visi dan Misi Daerah yang telah ditetapkan, serta mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan yang berkembang selama pelaksanaan tahun anggaran.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk mendeskripsikan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama sisa tahun anggaran berjalan, sehingga dapat menjadi acuan resmi bagi perangkat daerah serta para pemangku kepentingan terkait. Rencana ini dimaksudkan untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah dan mempertimbangkan perkembangan serta kebutuhan aktual.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bagian C.5 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang rencana kerja dan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang Catatan Penting, Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target program kegiatan dan sub kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan pemasalahan yang dihadapi.

BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026. Pada tahun 2025 BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan 2 Sasaran, 9 Indikator dengan 3 Program 12 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan indikator kinerja yang telah diukur pencapaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (output). Target capaian kinerja ditetapkan dalam Renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja, hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Berikut menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian Renstra BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan Tahun 2025.

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra BKPSDM s/d Tahun 2025

Kabupaten Kotawaringin Timur

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2025			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025**	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH									
5	03					KEPEGAWAIAN									
5	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5	03	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	03	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	6	4	1	1	1,00	1	5	0,83
5	03	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5	03	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang disediakan	448	299	73	0	0,00	73	299	0,67

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2025			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025**	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor	Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	215	143	15	3	0,20	15	146	0,68
5	03	01	2	05	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	2.352	1568	392	3	0,01	392	1571	0,67
5	03	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	03	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	21	14	17	21	1,24	17	35	1,67
5	03	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7	5	6	6	1,00	6	11	1,52
5	03	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	39.441	26294	6.520	1.630	0,25	6.520	27924	0,71
5	03	01	2	06	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis yang dipenuhi	65	43	64	60	0,94	64	103	1,59

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2025			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025**	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah sajian yang disiapkan per tahun	11.990	7993	12	5	0,42	12	7998	0,67
5	03	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	365	243	50	12	0,24	50	255	0,70
5	03	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5	03	01	2	07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang disediakan	1	-	-	-	-	-	0	0,00
5	03	01	2	07	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	6	4	1	1	1,00	1	5	0,83
5	03	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dikirim per tahun	522	348	100	10	0,10	100	358	0,69

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2025			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025**	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang dimanfaatkan untuk pelayanan kantor per tahun	16	11	4	2	0,50	4	13	0,79
5	03	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	28	19	28	9	0,32	28	28	0,99
5	03	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	35	23	35	13	0,37	35	36	1,04
5	03	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4	3	4	-	-	4	3	0,75
5	03	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	11	7	8	6	0,75	8	13	1,21

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2025			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025**	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2						3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														
5 03 02 2 01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN														
5 03 02 2 01 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						Jumlah pemenuhan pegawai sesuai dengan ketentuan	5.702	3801	2	0	0,00	2	3801	0,67
5 03 02 2 01 06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						Jumlah PNS yang terselesaikan hak pensiunnya tepat waktu	1.425	950	6	1	0,17	6	951	0,67
5 03 02 2 01 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						Jumlah kegiatan kelembagaan profesi ASN yang di fasilitasi	36	24	1	1	1,00	1	25	0,69
5 03 02 2 01 10	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						Jumlah sistem informasi kepegawaian yang tersedia	100	67	1	0	0,00	1	67	0,67
5 03 02 2 01 11	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian						Tersedianya data kepegawaian yang update	6.000	4000	1	0	0,00	1	4000	0,67

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2025			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025**	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2	02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN									
5	03	02	2	02	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang mutasi	175	117	3	0	0	3	117	0,67
5	03	02	2	02	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah usul kenaikan pangkat PNS yang dikelola	5.500	3667	2	1	0,5	2	3668	0,67
5	03	02	2	02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pejabat yang mengikuti assesment / talent pool	575	383	2	0	0	2	383	0,67
5	03	02	2	03		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN									
						Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti assesment	375	250	1	0	0	1	250	0,67
5	03	02	2	03	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan	512	341	20	10	0,5	20	351	0,69
5	03	02	2	04		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2025			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025**	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2	04	01	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN dan monitoring kinerja ASN	360	240	2	1	0,5	2	241	0,67
5	03	02	2	04	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tercapainya pengembangan penilaian kinerja ASN	17	11	49	18	0,37	49	29	1,73
5	03	02	2	04	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya pengusulan pemberian penghargaan PNS	12	8	500	0	0	500	8	0,67
5	03	02	2	04	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Terlaksananya pengusulan pemberian tanda jasa bagi PNS	8	5	50	0	0	50	5	0,67
5	03	02	2	04	07	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan dalam rangka mendisiplinkan ASN	24	16	5.380	0	0	5.380	16	0,67
5	03	02	2	04	08	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pelanggaran disiplin ASN yang tertangani	110	73	25	0	0	25	73	0,67

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2025			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025**	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2	04	09	Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Proses Izin Perceraian Pegawai yang tertangani	80	53	25	0	0	25	53	0,67
5	03	02	2	04	10	Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya evaluasi disiplin ASN	16	11	49	0	0	49	11	0,67
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
5	04	02	2	01		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis									
5	04	02	2	01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional	1.440	960	240	60	0,25	240	1020	0,71

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2025			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025**	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 04 02 2 02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional									
5 04 02 2 02 07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	2.247	1498	24	6	0,25	24	1504	0,67

**Realisasi Sampai dengan TW II Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Secara umum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga penunjang urusan Pemerintah di bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Badan ini berperan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik dan proporsional.

Adapun Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dengan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik. Sebagai parameter kinerja dan indikator kinerja pelayanan sangat penting dalam memastikan bahwa setiap Perangkat Daerah dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta memenuhi norma dan standar pelayanan yang berlaku. Langkah - Langkah Menentukan Tolok Ukur Kinerja:

- Identifikasi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) : Memahami secara mendalam tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah.
- Menetapkan Norma dan Standar Pelayanan : Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menetapkan norma dan standar pelayanan yang harus dipenuhi.
- Penentuan Tolok Ukur Kinerja : Menetapkan kriteria spesifik yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, misalnya: efisiensi, efektivitas, kualitas, dan kepuasan pelanggan.
- Penentuan Indikator Kinerja Pelayanan : Menentukan indikator kinerja yang dapat menggambarkan pencapaian setiap tugas dan fungsi.
- Pengumpulan dan Analisis Data: Mengumpulkan data yang diperlukan secara periodik dan sistematis kemudian melakukan analisis data untuk mengevaluasi kinerja pelayanan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
- Pelaporan dan Evaluasi: Menyusun laporan kinerja secara berkala dan Melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Dengan menetapkan parameter yang jelas dan terukur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka dengan baik, serta memenuhi norma dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini akan membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sehingga indikator kinerja yang diukur dalam pelaksanaan

target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
3. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
4. Indeks Kepuasan Kepegawaian
5. Persentase Pelanggaran Disiplin
6. Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB
7. Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi
8. Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK
9. Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun

Berdasarkan data tabel T-C.30 mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan: Target tahun 2025 adalah 32 Jam Pelajaran (JP), dengan realisasi mencapai 12 JP pada triwulan II, menunjukkan kinerja 37.50% dari target. Proyeksi tahun 2026 adalah 40 JP, menunjukkan harapan peningkatan di tahun-tahun mendatang.
2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal: Target tahun 2025 adalah 2.2%, dengan realisasi mencapai 1.09% pada triwulan II, menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pencapaian 49.60% dari target. Proyeksi tahun 2026 adalah 2.2%, menunjukkan harapan stabilitas dalam pencapaian target.
3. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural: Target tahun 2025 adalah 9.58%, dengan realisasi mencapai 8,29% pada triwulan II. menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pencapaian 86.55% dari target. Adapun Proyeksi tahun 2026 adalah 9.58% adalah 10.08%.
4. Indeks Kepuasan Kepegawaian: Target tahun 2025 adalah Baik, dengan realisasi mencapai Baik pada triwulan II, menunjukkan kinerja sesuai target.
5. Persentase Pelanggaran Disiplin: Target tahun 2025 adalah 0.18%, dengan realisasi mencapai 0.16% pada triwulan II, menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pencapaian di bawah target. Proyeksi tahun 2026 masing adalah 0.14%.

6. Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB: Target tahun 2025 adalah 96.91%, dengan realisasi mencapai 100.05% pada triwulan II, menunjukkan kinerja yang sedikit melebihi target dengan pencapaian 100.10%.
7. Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi: Target tahun 2025 adalah 57%, dengan realisasi mencapai 56.33% pada triwulan II, menunjukkan kinerja yang melebihi target dengan pencapaian 103.73%. Proyeksi tahun 2026 masing adalah 63%.
8. Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK: Target tahun 2025 adalah 91.72%, dengan realisasi mencapai 67.99% pada triwulan II, menunjukkan kinerja 74.13% dari target. Proyeksi tahun 2026 adalah 100%.
9. Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun: Target tahun 2025 adalah 80%, dengan realisasi mencapai 43.75% pada triwulan II. Proyeksi tahun 2026 adalah 100%.

Secara keseluruhan, kinerja BKPSDM menunjukkan pencapaian yang sebagian besar melampaui target yang ditetapkan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum tercapai pada triwulan II tahun 2025. Kinerja yang baik ini mencerminkan efektivitas program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2024	2025 (S/ d Triwulan II)	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan			24	32	32	40	36	12	40	
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			2,20	2,20	2,20	2,20	5,74	1,09	2,20	
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			8,57	9,07	9,58	10,08	9,72	8,29	10,08	
4	Indeks Kepuasan Kepegawaian			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
5	Persentase Pelanggaran Disiplin			0,23	0,22	0,18	0,14	0,17	0,16	0,14	
6	Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB			94,33	95,11	96,91	96,91	95,21	96,96	96,91	
7	Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi			46,00	52,00	57,00	63,00	56,33	56,33	63,00	
8	Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK			74,61	83,28	91,72	100	67,03	67,99	100	
9	Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun			40,00	60,00	80,00	100,00	31,25	43,75	100,00	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, diperlukan aparatur pemerintahan yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut dikarenakan aparatur pemerintahan sebagaimana dimaksud disertai tugas untuk :

- Melaksanakan Tugas Pelayanan Publik, yakni : memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif kepada masyarakat luas (public);
- Melaksanakan Tugas Pemerintahan, yakni : melaksanakan tugas-tugas dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan; dan
- Melaksanakan Tugas Pembangunan Tertentu, Yakni : Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Dilakukan Melalui Pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas.

Untuk dapat menjalankan tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas, sudah semestinya aparatur pemerintah memiliki manajemen yang baik, yakni manajemen dapat memperbandingkan (Merit System) antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Perubahan Tata Kelola Pemerintahan dari Sentralistik ke Desentralisasi memberikan dampak Signifikan terhadap Manajemen Pengelola Kepegawaian. Kebijakan Desentralisasi Memberikan kewenangan luas bagi masing-masing daerah untuk mengelola kepegawaian, oleh karena itu tanggung jawab menciptakan Birokrasi yang ideal tidak hanya tertumpu pada Pemerintahan Pusat, melainkan juga pada Pemerintahan Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur mengemban tugas untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Daerah. Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semakin kompleks dengan adanya arus reformasi birokrasi yang ditentukan agenda Nasional untuk menciptakan tatanan birokrasi yang mampu menjawab Perubahan Sosial yang dinamis dan kompleks. Kendala yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mengemban tugas tersebut yaitu:

- Belum Optimalnya dalam melaksanakan pelayanan dalam bidang kepegawaian

- Masih rendahnya kemampuan SDM ASN
- Masih rendahnya tingkat kedisiplinan ASN
- Belum Optimalnya dalam penataan dan penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang ada

Dampaknya terhadap Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mengatasi kendala tersebut sangat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah untuk Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketataan hukum, serta berpengaruh juga terhadap capaian program nasional.

Dalam rangka itulah dibutuhkan adanya Analisis Lingkungan eksternal, yang pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan yang terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial budaya, politik, dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai tantangan (threats) dan peluang (opportunity) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tantangan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

1. Perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang harus disikapi secara cepat dan tepat.
2. Adanya tuntutan peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian yang lebih baik mulai dari rekrutmen sampai pensiun.
3. Budaya kerja PNS yang masih belum memenuhi harapan.
4. Masih adanya pelanggaran disiplin pegawai.
5. Tuntutan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur.

Peluang yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain :

1. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan dan ketentuan tentang manajemen kepegawaian mulai dari sistem perekrutan aparatur, disiplin pegawai, kesejahteraan pegawai sampai pada proses pemberhentian pegawai, yang dapat dikembangkan untuk mengelola manajemen kepegawaian secara profesional.
2. Penawaran peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui penyelenggaraan diklat struktural, fungsional dan beasiswa pendidikan formal melalui tugas belajar dari instansi pusat maupun daerah, dapat memberikan kesempatan kepada pegawai aparatur untuk mengembangkan kompetensinya.
3. Adanya Komitmen Pimpinan dalam penataan Manajemen Kepegawaian.
4. Sistem teknologi informasi komputerisasi yang mendukung pelayanan kepegawaian cepat, tepat serta akuntabel.

Dalam melakukan Pembangunan Kepegawaian di Kabupaten Kotawaringin Timur , maka Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan berkaitan dengan keadaan kepegawaian di Kabupaten Kotawaringin Timur , antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Aplikasi Berbasis Web dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian agar dapat diakses dengan mudah. Bahwa arus globalisasi dan revolusi teknologi informatika dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan semakin berkembang, merupakan tantangan tersendiri bagi upaya menciptakan Tata Pemerintahan yang baik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Namun demikian, apabila perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak dimanfaatkan secara optimal/ secara tepat dan tidak didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang memadai, tentunya akan menghambat dalam upaya penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang akuntabel.
2. Belum Optimalnya Penempatan Pegawai Berdasarkan Standar Kompetensi jabatan. Kondisi saat ini, bahwa pelaksanaan manajemen ASN belum sepenuhnya berdasarkan pola perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan dalam rekrutment, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baru.
3. Belum Optimalnya Pemenuhan akan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, baik Diklat Struktural, Fungsional maupun Teknis. ASN merupakan aset organisasi yang harus ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya. Pengembangan kompetensi ASN adalah jawaban untuk menyiapkan ASN yang berkompeten. Pengembangan Kompetensi adalah solusi menutup jurang/ Gap kompetensi yang dimiliki aparatur namun diakui selama ini pengembangan kompetensi ASN masih belum memenuhi harapan, terutama karena keterbatasan anggaran di sisi lain undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah memberikan ruang bagi abdi negara untuk mengembangkan kompetensi. undang- undang menyatakan bahwa setiap ASN berhak mendapatkan pengembangan dari minimal 20 JP (jam pelajaran) dalam setahun.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan Rencana Kinerja dapat memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tercantum dalam rencana strategis dengan disertai strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2025. Penetapan rencana kinerja kegiatan dan sasaran akan memberikan daya dorong sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan sumber daya dan akan dilaporkan

penggunaannya lewat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada setiap akhir tahun anggaran.

Rencana Kerja RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Kerja RKPD. Review terhadap Rencana Kerja RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolak ukur dan target atau sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan pada setiap program/ kegiatan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dalam perencanaan anggaran yang baik jelas berimbas pada pelaksanaan anggarannya. Anggaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan yang jelas apa bila kita kekurangan anggaran maka akan berimbas pada tidak akan terlaksananya kegiatan tersebut dan apa bila kelebihan pagu anggaran merupakan pemborosan uang Negara.

Review Rencana Kerja Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing bidang dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana Tabel TC - 31 dibawah ini.

Tabel T.C.31
Review terhadap RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kotawaringin Timur

Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(2)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					
KEPEGAWAIAN				20.641.007.887	KEPEGAWAIAN				20.641.007.887	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.761.943.587	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.761.943.587	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.097.485.871	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.097.485.871	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotim	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	45 Orang/bulan	8.097.485.871	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotim	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	45 Orang/bulan	8.097.485.871	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				455.993.300	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				455.993.300	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotim	Jumlah pakaian yang disediakan	73 Paket	66.090.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotim	Jumlah pakaian yang disediakan	73 Paket	66.090.000	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	141.842.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	141.842.000	

Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(2)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	392 Orang	208.693.300	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	392 Orang	208.693.300	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.563.547.840	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.563.547.840	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotim	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	17 Paket	48.733.250	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotim	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	17 Paket	48.733.250	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotim	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	85.882.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotim	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	85.882.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotim	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6520 Dokumen	35.010.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotim	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6520 Dokumen	35.010.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kotim	Jumlah alat tulis yang dipenuhi	64 Paket	80.185.590	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kotim	Jumlah alat tulis yang dipenuhi	64 Paket	80.185.590	
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kotim	Jumlah sajian yang disiapkan per tahun	12 Laporan	101.020.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kotim	Jumlah sajian yang disiapkan per tahun	12 Laporan	101.020.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotim	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	50 Laporan	468.330.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotim	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	50 Laporan	468.330.000	

Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(2)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				988.804.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				988.804.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah gedung kantor yang disediakan	1 Unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah gedung kantor yang disediakan	1 Unit	-	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	1 Unit	1.033.804.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	1 Unit	1.033.804.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.497.132.232	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.497.132.232	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotim	Jumlah surat dikirim per tahun	100 Laporan	13.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotim	Jumlah surat dikirim per tahun	100 Laporan	13.500.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotim	Jumlah jasa yang dimanfaatkan untuk pelayanan kantor per tahun	4 Laporan	667.010.044	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotim	Jumlah jasa yang dimanfaatkan untuk pelayanan kantor per tahun	4 Laporan	667.010.044	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotim	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	28 Laporan	816.622.188	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotim	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	28 Laporan	816.622.188	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				859.997.150	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				859.997.150	

Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(2)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotim	Jumlah kendaraan yang dipelihara	35 Unit	517.417.150	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotim	Jumlah kendaraan yang dipelihara	35 Unit	517.417.150	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	254.690.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	254.690.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah peralatan yang dipelihara	8 Unit	276.690.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah peralatan yang dipelihara	8 Unit	276.690.000	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				3.848.938.194	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				3.848.938.194	
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.268.394.394	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.268.394.394	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kotim	Jumlah pemenuhan pegawai sesuai dengan ketentuan	2 Dokumen	685.474.375	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kotim	Jumlah pemenuhan pegawai sesuai dengan ketentuan	2 Dokumen	685.474.375	
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kotim	Jumlah PNS yang terselesaikan hak pensiunnya tepat waktu	6 Dokumen	59.299.952	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kotim	Jumlah PNS yang terselesaikan hak pensiunnya tepat waktu	6 Dokumen	59.299.952	
Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan kelembagaan profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	389.654.452	Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan kelembagaan profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	389.654.452	

Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(2)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan	20 Orang	368.196.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan	20 Orang	368.196.000	
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				347.659.000	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				347.659.000	
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	33.323.200	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kotim	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN dan monitoring kinerja ASN	2 Dokumen	33.323.200	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	49 Dokumen	14.234.200	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kotim	Tercapainya pengembangan penilaian kinerja ASN	49 Dokumen	14.234.200	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kab. Kotim	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	500 Orang	29.539.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Kotim	Terlaksananya pengusulan pemberian penghargaan PNS	500 Orang	29.539.000	
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kab. Kotim	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 Orang	35.712.000	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Kotim	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan dalam rangka mendisiplinkan ASN	50 Orang	35.712.000	
Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Kotim	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5380 Orang	52.950.600	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kotim	Pelanggaran disiplin ASN yang tertangani	5380 Orang	52.950.600	

Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(2)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Laporan	22.610.400	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Laporan	22.610.400	
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	42.957.100	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	42.957.100	
Evaluasi Disiplin ASN	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	49 Laporan	32.844.500	Evaluasi Disiplin ASN	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	49 Laporan	32.844.500	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.879.064.300	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.879.064.300	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				3.879.064.300	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				3.879.064.300	
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				532.115.300	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				532.115.300	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional	240 orang	532.115.300	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional	240 orang	532.115.300	

Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(2)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				2.706.437.000	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				2.706.437.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	24 Laporan	2.706.437.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	24 Laporan	2.706.437.000	
JUMLAH				20.641.007.887	JUMLAH				20.641.007.887	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur berasal dari kelompok masyarakat, DPRD maupun Perangkat Daerah dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program .

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur berasal dari berbagai sumber, termasuk kelompok masyarakat, DPRD, dan Perangkat Daerah. Proses ini melibatkan penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program melalui beberapa komponen, diantaranya :

A. Proses Pengumpulan Usulan Program/Kegiatan

- **Proses Pengumpulan Usulan:**

Musrenbang Kabupaten: Usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Kabupaten terutama terkait dengan pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik/guru.

- **Forum Musrenbang Tingkat Kelurahan:**

Usulan yang dikumpulkan dari Musrenbang tingkat kelurahan, yang kemudian dibahas pada tingkat kabupaten.

B. Pokok-Pokok Pikiran DPRD:

Usulan yang disampaikan oleh anggota DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat dan pengamatan.

C. Musrenbang Tematik:

Usulan yang dikumpulkan dari Musrenbang tematik yang fokus pada isu-isu tertentu.

D. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah:

Usulan yang berasal dari forum-forum Perangkat Daerah atau lintas Perangkat Daerah yang membahas kebutuhan dan program bersama.

Kaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi: Semua usulan yang diterima dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Usulan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan Calon Aparatur Sipil Negara dianalisis dalam kerangka Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah.

Hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dideskripsikan secara rinci. Kajian ini mencakup penelitian lapangan dan pengamatan selama pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Usulan yang terkait dengan pemenuhan tenaga pegawai harus terakomodir dalam Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, yang kemudian disampaikan ke Kementerian PAN & RB untuk proses lebih lanjut.

Mengenai Usulan masyarakat yang disampaikan melalui pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang terkait dengan tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur tidak terdapat usulan secara spesifik untuk tahun 2025. Berkenaan dengan pemenuhan tenaga teknis, tenaga kesehatan dan guru/tenaga pendidik disampaikan bahwa semua usulan kekurangan ASN harus terakomodir dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian PAN-RB melalui e – Formasi. Berikut adalah tabel yang menunjukkan sumber usulan program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan:

Tabel T-C.32
Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J U M L A H				-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah, penyusunan rencana kerja tahunan merupakan salah satu langkah penting. Rencana kerja tahun 2025 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek penting, termasuk analisis situasi terkini, kebijakan nasional, dan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2025 akan menggunakan alokasi APBD Murni untuk program, kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun program yang akan dilaksanakan meliputi Program Urusan Pemerintahan Daerah, Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun Faktor - Faktor Pertimbangan Dalam merumuskan program dan kegiatan, BKPSDM mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Program dan kegiatan dirancang untuk mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing.

b. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Program dan kegiatan BKPSDM diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, mengurangi kesenjangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

c. Kebutuhan dan Tantangan Daerah

Program dan kegiatan dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah, termasuk kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai, perkembangan teknologi informasi, dan perubahan regulasi.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2021-2026 pada prioritas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, RPJPD 2005-2025 Kabupaten Kotawaringin Timur meningkatkan profesionalisme pegawai negeri sipil, melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya, bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi

sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur akan melaksanakan kegiatan Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Target Kinerja 2025
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		
		Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Indeks Profesionalisme ASN		
			Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jumlah JP diklat yang dilaksanakan / Jumlah JP seharusnya x 100	32 JP
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ Jumlah ASN x 100	2,20 %
			Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat / Jumlah seluruh pejabat struktural	10,08 %
			Indeks Kepuasan Kepegawaian	Sesuai Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Baik
		Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel	Penerapan sistem yang terintegrasi		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Target Kinerja 2025
			Persentase Pelanggaran Disiplin	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran}}{\text{Jumlah seluruh pegawai}} \times 100\%$	0,14 %
			Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/ BB	$\frac{\text{SKP nilai diatas B}}{\text{SKP nilai seluruhnya}} \times 100$	96,91%
			Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi	$\frac{\text{Jumlah jabatan sesuai kompetensi}}{\text{Jumlah pejabat yang menduduki jabatan}} \times 100$	63,00 %
			Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan pegawai}}{\text{Jumlah ABK}} \times 100$	100 %
			Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun	$\frac{\text{Jumlah SIM layanan Kepegawaian terbangun}}{\text{Jumlah SIM layanan Kepegawaian seharusnya}} \times 100\%$	100,00 %

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Manajemen Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur , maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur didasarkan pada dua sisi, yaitu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang bersifat Non Urusan/ Penunjang dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Urusan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non Urusan dipusatkan pada upaya menata kelembagaan, ketatalaksanaan dan mengefektifkan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur yang tercermin dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, sedangkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur mengusulkan 3 (tiga) Program yang terdiri dari 12 (dua belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. URUSAN KEPEGAWAIAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- 1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.2.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.2.3 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
- 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
 - 1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material
 - 1.3.4 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.3.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- ##### 1.5. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ##### 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- 1.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Kepegawaian Daerah

- 2.1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 2.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - 2.1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - 2.1.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 2.1.5 Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
- 2.2. Kegiatan Mutasi dan Promosi
 - 2.2.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
 - 2.2.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat
 - 2.2.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
- 2.3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - 2.3.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center
 - 2.3.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- 2.4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2.4.1 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2.4.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2.4.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
 - 2.4.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
 - 2.4.5 Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN
 - 2.4.6 Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
 - 2.4.7 Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
 - 2.4.8 Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN

B. URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1.1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- 2.5 Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

2.5.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kotawaringin Timur

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KEPEGAWAIAN								
5	03									20.641.007.887				20.641.007.887
5	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	Kab. Kotim	100	16.761.943.587	APBD		100	16.761.943.587
							Nilai LAPKIN Perangkat Daerah	Kab. Kotim	B		APBD		B	
							Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD	Kab. Kotim	100		APBD		100	
5	03	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana	Kab. Kotim	100	8.097.485.871	APBD		100	8.097.485.871
5	03	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotim	45 Orang/bulan	8.097.485.871	APBD		45 Orang/bulan	8.097.485.871

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Kotim	100	455.993.300	APBD		100	455.993.300
5	03	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kotim	73 Paket	66.090.000	APBD		73 Paket	66.090.000
5	03	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kotim	15 Orang	141.842.000	APBD		15 Orang	141.842.000
5	03	01	2	05	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotim	392 Orang	208.693.300	APBD		392 Orang	208.693.300
5	03	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Kotim	100	1.563.547.840	APBD		100	1.563.547.840
5	03	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kotim	17 Paket	48.733.250	APBD		17 Paket	48.733.250
5	03	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kotim	6 Paket	85.882.000	APBD		6 Paket	85.882.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kotim	6520 Dokumen	35.010.000	APBD		6520 Dokumen	35.010.000
5	03	01	2	06	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kotim	64 Paket	80.185.590	APBD		64 Paket	80.185.590
5	03	01	2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kotim	12 Laporan	101.020.000	APBD		12 Laporan	101.020.000
5	03	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotim	50 Laporan	468.330.000	APBD		50 Laporan	468.330.000
5	03	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi	Kab. Kotim	100	988.804.000	APBD		100	988.804.000
5	03	01	2	07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kotim	1 Unit	-	APBD		1 Unit	-
5	03	01	2	07	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kotim	1 Unit	1.033.804.000	APBD		1 Unit	1.033.804.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Kotim	100	1.497.132.232	APBD		100	1.497.132.232
5	03	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotim	100 Laporan	13.500.000	APBD		100 Laporan	13.500.000
5	03	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kotim	4 Laporan	667.010.044	APBD		4 Laporan	667.010.044
5	03	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kotim	28 Laporan	816.622.188	APBD		28 Laporan	816.622.188
5	03	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	Kab. Kotim	100	859.997.150	APBD		100	859.997.150
5	03	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kotim	35 Unit	517.417.150	APBD		35 Unit	517.417.150

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kotim	4 Unit	254.690.000	APBD		4 Unit	254.690.000
5	03	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kotim	8 Unit	276.690.000	APBD		8 Unit	276.690.000
5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kotim	100	3.848.938.194	APBD		100	3.848.938.194
5	03	02	2	01		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai	Kab. Kotim	100	1.268.394.394	APBD		100	1.268.394.394
5	03	02	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kotim	2 Dokumen	685.474.375	APBD		2 Dokumen	685.474.375
5	03	02	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kotim	6 Dokumen	59.299.952	APBD		6 Dokumen	59.299.952

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	02	2	01	08	Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kab. Kotim	1 Lembaga	389.654.452	APBD		1 Lembaga	389.654.452
5	03	02	2	01	10	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kotim	1 Dokumen	90.000.000	APBD		1 Dokumen	90.000.000
5	03	02	2	01	11	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kotim	1 Dokumen	4.955.615	APBD		1 Dokumen	4.955.615
5	03	02	2	02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi	Kab. Kotim	100	956.344.600	APBD		100	956.344.600
5	03	02	2	02	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Kotim	3 Dokumen	19.440.000	APBD		3 Dokumen	19.440.000
5	03	02	2	02	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kotim	2 Dokumen	121.775.600	APBD		2 Dokumen	121.775.600

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	02	2	02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi	Kab. Kotim	2 Dokumen	882.809.000	APBD		2 Dokumen	882.809.000
5	03	02	2	03		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Kab. Kotim	100	1.367.097.200	APBD		100	1.367.097.200
5	03	02	2	03	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kab. Kotim	1 Dokumen	963.162.200	APBD		1 Dokumen	963.162.200
5	03	02	2	03	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Kotim	20 Orang	368.196.000	APBD		20 Orang	368.196.000
5	03	02	2	04		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang capaian kinerjanya sesuai dengan target	Kab. Kotim	100	347.659.000	APBD		100	347.659.000
5	03	02	2	04	01	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kotim	2 Dokumen	33.323.200	APBD		2 Dokumen	33.323.200

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Praldran Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	02	2	04	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kotim	49 Dokumen	14.234.200	APBD		49 Dokumen	14.234.200
5	03	02	2	04	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Kotim	500 Orang	29.539.000	APBD		500 Orang	29.539.000
5	03	02	2	04	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kab. Kotim	50 Orang	35.712.000	APBD		50 Orang	35.712.000
5	03	02	2	04	07	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kab. Kotim	5380 Orang	52.950.600	APBD		5380 Orang	52.950.600
5	03	02	2	04	08	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kotim	25 Laporan	22.610.400	APBD		25 Laporan	22.610.400
5	03	02	2	04	09	Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab. Kotim	25 Dokumen	42.957.100	APBD		25 Dokumen	42.957.100
5	03	02	2	04	10	Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Kab. Kotim	49 Laporan	32.844.500	APBD		49 Laporan	32.844.500

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.879.064.300				3.879.064.300
5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tingkat Pengembangan SDM Aparatur	Kab. Kotim	100	3.879.064.300	APBD		100	3.879.064.300
5	04	02	2	01		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Kotim	100	532.115.300	APBD		100	532.115.300
5	04	02	2	01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Kotim	240 orang	532.115.300	APBD		240 orang	532.115.300
5	04	02	2	02		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Struktural	Kab. Kotim	100	2.706.437.000	APBD		100	2.706.437.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 04 02 2 02 07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Kotim	24 Laporan	2.706.437.000	APBD		24 Laporan	2.706.437.000
JUMLAH					20.641.007.887				20.641.007.887

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja, perubahan kondisi, serta kebutuhan aktual selama tahun berjalan. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, khususnya pada lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam dokumen Renja Perubahan ini diuraikan secara eksplisit penyesuaian rencana kerja dan pendanaan yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu anggaran, lokasi pelaksanaan, serta kelompok sasaran penerima manfaat—baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Penyusunan rencana kerja perubahan ini tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja tahun berjalan.

Perencanaan dan pendanaan dalam Renja Perubahan ini juga memperhatikan analisis terhadap capaian kinerja, tantangan implementasi, dan sinergi antarkegiatan, sehingga perangkat daerah dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan dijabarkan berdasarkan tugas dan fungsi BKPSDM, dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Selain itu, penyusunan Renja Perubahan juga dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan, untuk memastikan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik secara menyeluruh.

Secara rinci, uraian kerangka pendanaan serta rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 yang mengalami perubahan, disajikan dalam bentuk matriks pada tabel Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang terlampir dalam dokumen ini.

Tabel 4.1

**Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Daerah		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	16	19	20
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				16.372.705.066,00	20.641.007.887,00	20.641.007.887,00			21.815.418.850,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				16.372.705.066,00	20.641.007.887,00	20.641.007.887,00			21.815.418.850,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN				14.470.529.066,00	17.402.455.587,00	16.761.943.587,00			18.872.838.300,00	
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	11.100.606.952,00	13.462.960.393,00	12.913.005.393,00			12.123.624.465,00	
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	5.827.297.786,00	8.097.485.871,00	8.097.485.871,00		-	6.390.574.065,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Daerah		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	16	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	5.827.297.786,00	8.097.485.871,00	8.097.485.871,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	6.390.574.065,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-	-	-	477.975.000,00	455.993.300,00	455.993.300,00		4. Tata Kelola Pemerintahan	823.449.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	73 Paket	73 Paket	51.700.000,00	66.090.000,00	66.090.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	71.609.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	231.230.000,00	181.210.000,00	141.842.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	276.840.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	392 Orang	392 Orang	195.045.000,00	208.693.300,00	208.693.300,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	475.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	16	19	20		
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.741.660.340,00	1.563.547.840,00	1.563.547.840,00		4. Tata Kelola Pemerintahan	1.765.935.200,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	35.300.250,00	35.300.250,00	48.733.250,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	40.227.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	85.882.000,00	85.882.000,00	85.882.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	133.999.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6520 Dokumen	6520 Dokumen	30.000.000,00	35.010.000,00	35.010.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	52.068.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material												
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	64 Paket	64 Paket	85.578.090,00	80.185.590,00	80.185.590,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	114.293.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja/ dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	16	19	20
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100.250.000,00	101.020.000,00	101.020.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	72.938.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	1.404.650.000,00	1.226.150.000,00	468.330.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	1.352.410.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	376.250.000,00	988.804.000,00	988.804.000,00		4. Tata Kelola Pemerintahan	284.774.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disedlakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata Kelola Pemerintahan	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disedlakan	1 Unit	1 Unit	376.250.000,00	988.804.000,00	1.033.804.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	284.774.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.595.653.826,00	1.497.132.232,00	1.497.132.232,00		4. Tata Kelola Pemerintahan	2.239.494.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	16	19	20		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	675.280.546,00	667.010.044,00	667.010.044,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	402.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28 Laporan	28 Laporan	906.873.280,00	816.622.188,00	816.622.188,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	1.802.494.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.081.770.000,00	859.997.150,00	859.997.150,00		4. Tata Kelola Pemerintahan	619.398.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	35 Unit	504.200.000,00	410.287.150,00	517.417.150,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	372.556.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	16	19	20	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	382.550.000,00	254.690.000,00	254.690.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	139.052.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	195.020.000,00	195.020.000,00	276.690.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	107.790.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
2	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	3.369.922.114,00	3.939.495.194,00	3.848.938.194,00			6.749.213.835,00			
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	1.233.530.000,00	1.268.394.394,00	1.268.394.394,00		4. Tata Kelola Pemerintahan	2.057.879.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK											
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen	700.200.000,00	709.134.375,00	685.474.375,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	973.414.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi											
						Pemberhentian											
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6 Dokumen	6 Dokumen	61.560.000,00	67.369.952,00	59.299.952,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	49.137.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	16	19	20		
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN												
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	376.220.000,00	396.934.452,00	389.654.452,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	729.009.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	279.949.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	5.550.000,00	4.955.615,00	4.955.615,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	26.370.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-	-	1.381.553.114,00	956.344.600,00	956.344.600,00		4. Tata Kelola Pemerintahan	1.840.698.285,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	41.436.000,00	19.440.000,00	19.440.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	82.082.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenalkan Pangkat ASN												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Daerah		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	16	19	20
							Jumlah Pengelolaan Kenalkan Pangkat ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	179.050.000,00	134.095.600,00	121.775.600,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	302.051.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	1.161.067.114,00	802.809.000,00	882.809.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	1.456.565.285,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	-	446.653.000,00	1.367.097.200,00	1.367.097.200,00		4. Tata Kelola Pemerintahan	2.079.328.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center										
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	60.590.000,00	972.655.200,00	963.162.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	131.328.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN										
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20 Orang	20 Orang	386.063.000,00	394.442.000,00	368.196.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	1.948.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	308.186.000,00	347.659.000,00	347.659.000,00		4. Tata Kelola Pemerintahan	771.308.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Daerah		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	16	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	2 Dokumen	55.475.000,00	65.877.200,00	33.323.200,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	61.548.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	49 Dokumen	49 Dokumen	98.450.000,00	16.334.200,00	14.234.200,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	99.586.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai											
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	500 Orang	500 Orang	25.390.000,00	29.539.000,00	29.539.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai											
							Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 Orang	50 Orang	13.300.000,00	67.746.000,00	35.712.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN											
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5380 Orang	5380 Orang	45.171.000,00	52.950.600,00	52.950.600,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	117.194.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	16	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Laporan	25 Laporan	19.980.000,00	22.610.400,00	22.610.400,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	177.979.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai										
							Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	25 Dokumen	25.070.000,00	45.757.100,00	42.957.100,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN										
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	49 Laporan	49 Laporan	25.350.000,00	46.844.500,00	32.844.500,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.902.176.000,00	3.238.552.300,00	3.879.064.300,00			2.942.580.550,00	
3	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	1.902.176.000,00	3.238.552.300,00	3.879.064.300,00			2.942.580.550,00	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	-	354.340.000,00	532.115.300,00	532.115.300,00		4. Tata Kelola Pemerintahan	514.526.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, lnti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	240 Orang	240 Orang	354.340.000,00	532.115.300,00	515.739.300,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	514.526.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	16	19	20	
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	1.547.836.000,00	2.706.437.000,00	2.706.437.000,00		4. Tata Kelola Pemerintahan	2.428.054.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan											
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	24 Laporan	24 Laporan	1.547.836.000,00	2.706.437.000,00	3.363.325.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah	4. Tata Kelola Pemerintahan	2.428.054.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	J U M L A H								16.372.705.066,00	20.641.007.887,00	20.641.007.887,00			21.815.418.850,00			

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Pencapaian keberhasilan kinerja instansi pemerintah di era yang semakin kompleks dan dinamis menuntut setiap perangkat daerah untuk senantiasa melakukan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dinamika perubahan kebijakan, tuntutan masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi daerah menjadi faktor penting yang harus direspons dengan langkah-langkah perencanaan yang terukur, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Rencana Kerja Perubahan merupakan bagian integral dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dimulai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), pelaksanaan program dan kegiatan, hingga pelaporan kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Renja Perubahan disusun sebagai bentuk respons terhadap perubahan kebijakan, pergeseran prioritas, penyesuaian pagu anggaran, atau kondisi faktual lainnya yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.

Dokumen ini memberikan gambaran yang lebih rinci dan terkini terkait penyesuaian sasaran, strategi, program, kegiatan, serta sub kegiatan, termasuk indikator dan pendanaannya. Jika dalam pelaksanaan ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, maka koreksi dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan ini, diharapkan perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan, serta mendukung pencapaian tujuan strategis daerah secara lebih optimal.

Demikian dokumen Rencana Kerja Perubahan ini disusun sebagai pedoman operasional tahunan bagi peningkatan kinerja instansi, dengan harapan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya, permasalahan aktual yang dihadapi, serta penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Renja Perubahan ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang didorong melalui peran serta masyarakat.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, dengan penyesuaian terhadap arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan;
2. Sebagai instrumen sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, baik antar perangkat daerah maupun dengan pemerintah provinsi dan pusat;
3. Sebagai dasar pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, guna memastikan pencapaian kinerja yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah;
4. Sebagai bentuk penyesuaian kebijakan operasional, terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan faktual selama tahun anggaran berjalan, yang relevan dengan pencapaian tujuan strategis perangkat daerah.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur ini merupakan bentuk komitmen dalam menetapkan penyesuaian arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh aparatur di lingkungan BKPSDM selama sisa tahun anggaran berjalan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional serta bahan evaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tetap selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Penyesuaian prioritas program dan kegiatan dalam dokumen ini merupakan bentuk respons terhadap dinamika perencanaan dan implementasi pembangunan daerah, serta merupakan upaya untuk menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur secara lebih terarah. Diharapkan, melalui Rencana Kerja Perubahan ini, pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis, dan berkelanjutan bersama perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

5.4. Kesesuaian dengan Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 telah melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan perencanaan pembangunan daerah. Proses penyusunan ini dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan internal, guna memastikan bahwa dokumen ini tidak hanya memenuhi aspek administratif, namun juga mencerminkan kebutuhan aktual serta kondisi riil di lapangan.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, serta untuk menjaga konsistensi dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, Renja Perubahan BKPSDM Tahun 2025 ini menjadi pedoman operasional yang strategis dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sekaligus acuan dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran yang mendukung pencapaian tujuan perangkat daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh pegawai dan pemangku kepentingan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

Sampit, Juli 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA



Kamaruddin Makkaletu
KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197509042000031003

LAMPIRAN



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/0407/Huk-BAPPERIDA/2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR TAHUN 2025**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Tahun 2024 telah diverifikasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Revisi Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 (Lampiran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 35);
34. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025;

KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang telah diverifikasi adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit;
4. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;

16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
17. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur;
22. Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
23. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
24. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
26. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
27. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
28. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur;
31. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur;
32. Kecamatan Kota Besi
33. Kecamatan Cempaga;
34. Kecamatan Mentaya Hulu;
35. Kecamatan Parenggean;
36. Kecamatan Baamang;
37. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
38. Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
39. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan ;
40. Kecamatan Pulau Hanaut;
41. Kecamatan Antang Kalang;
42. Kecamatan Teluk Sampit;
43. Kecamatan Seranau;
44. Kecamatan Cempaga Hulu;
45. Kecamatan Telawang;
46. Kecamatan Bukit Santuai;
47. Kecamatan Tualan Hulu; dan
48. Kecamatan Telaga Antang.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 yang telah disahkan/ditetapkan menjadi pedoman dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 18 Juli 2024
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD
HALIKINNOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

A circular official stamp of the Kepala Bagian Hukum, Kotawaringin Timur, with a handwritten signature across it.
PINTAR SIMBOLON, S.H., M.H.
NIP. 19800908 200501 1 012